

JURNAL

PENELITIAN DOSEN PEMULA



ANALISIS PENGARUH BUMDES DALAM MENINGKATKAN EKONOMI PEDESAAN DI KABUPATEN SITUBONDO

Oleh :

Ketua : Yudhistira Harisandi, S.T, M.Si **0706067504**

Anggota : Muhammad Iqbal Anshory, S.SI, M.Si **0724028801**

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO

OKTOBER 2017

ANALISIS PENGARUH BUMDES DALAM MENINGKATKAN EKONOMI PEDESAAN DI KABUPATEN SITUBONDO

Yudhistira Harisandi, S.T, M.Si

Muhammad Iqbal Anshory, S.SI, M.Si

RINGKASAN

Badan usaha milik desa ini usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Pembentukan badan usaha milik desa ini juga berdasarkan pada Permendagri nomor 39 tahun 2010 pada bab II tentang pembentukan badan usaha milik desa. Pembentukan ini berasal dari pemerintah kabupaten/kota dengan menetapkan peraturan daerah tentang pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan BUM Desa.

Keberadaan BUM Desa diharapkan dapat mendukung munculnya kembali demokrasi sosial didesa melalui peningkatan kapasitas masyarakat desa tentang pengelolaan BUM Desa secara berkelanjutan, dan partisipasi masyarakat desa terhadap BUM Desa juga tidak lagi berkurang. Di sisi lain, pemerintah desa juga mampu berpola kreatif dan inovatif dalam mendominasi kegiatan ekonomi desa melalui kepemilikan BUM Desa sehingga dapat membangun perekonomian daerah yang dibutuhkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru, menghasilkan barang dan jasa substitusi daerah, meningkatkan perdagangan antar pemerintah daerah dan memberikan layanan yang optimal bagi konsumen.

Data yang digunakan dalam kajian ini berupa data primer yang diperoleh dari hasil wawancara, serta data sekunder dari instansi terkait dan data Potensi Desa tahun 2016. Responden dalam pengambilan data primer, dipilih secara “*purposive sampling*” berdasarkan komoditas yang menjadi unggulan di masing-masing kawasan perdesaan.

Hasil analisis SEM menunjukkan tingginya nilai koefisien yang menggambarkan kekuatan kontribusi indikator terhadap pengembangan BUM Desa di Kabupaten Situbondo. Dari hasil penelitian ini indikator yang kuat adalah X1.4 (etos kerja/sosial terhadap pengelolaan BUM Desa), X2.1 (ketersediaan sumberdaya alam dan potensi wilayah), X3.2 (ketersediaan sarana pendukung), X4.2 (organisasi sosial (*network*)) dan Y1.2 (jumlah dan ragam prasarana dan sarana wilayah perdesaan yang mendukung untuk pengembangan dan keberlanjutan BUM Desa di Kabupaten Situbondo).

Kata Kunci : Pengembangan Desa, Perekonomian Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan pedesaan harus menjadi prioritas utama dalam segenap rencana

strategi dan kebijakan pembangunan di Indonesia. Lembaga ekonomi perdesaan sampai saat ini tetap menjadi bagian penting, sekaligus masih menjadi titik lemah dalam rangka upaya mewujudkan kemandirian ekonomi desa. Kelembagaan ekonomi sebagai

bagian dari agen pemerintah terdepan yang dapat menjangkau kelompok masyarakat perdesaan yang hendak disejahterakan, yaitu dengan membentuk suatu badan usaha yaitu Badan Usaha Milik Desa yang sesuai dengan Permendagri nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, yang menyebutkan bahwa “*untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan, didirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa*”. Aset ekonomi yang ada di desa harus dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Substansi dan filosofi BUM Desa harus dijiwai dengan semangat kebersamaan dan *self help* sebagai upaya memperkuat aspek ekonomi kelembagaannya. Keberadaan BUM Desa diharapkan dapat mendukung munculnya kembali demokrasi sosial di desa melalui peningkatan kapasitas masyarakat desa tentang pengelolaan BUM Desa secara berkelanjutan, dan partisipasi masyarakat desa terhadap BUM Desa juga tidak lagi berkurang. Sedangkan di Kabupaten Situbondo merupakan salah satu kabupaten yang mengembangkan konsep pembangunan perdesaan yang berbasis pada potensi desa melalui kelembagaan BUM Desa.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan pada penelitian ini secara spesifik sebagai berikut :

1. Bagaimanakah keragaan relatif tingkat perkembangan desa sebagai lembaga pemerintahan otonom di Kabupaten Situbondo ?
2. Apakah yang mempengaruhi perkembangan dan keberlanjutan terhadap kelembagaan BUM Desa sebagai instrumen strategis mewujudkan kemandirian ekonomi desa ?
3. Bagaimanakah sintesa kebijakan publik yang dapat mendukung terhadap

perkembangan dan keberlanjutan terhadap kelembagaan BUM Desa sebagai instrumen strategis mewujudkan kemandirian ekonomi desa ?

1.3 Tujuan

Tujuan kajian terhadap peranan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam mewujudkan kemandirian ekonomi perdesaan berbasis potensi wilayah di Kabupaten Situbondo diantaranya yaitu :

1. Memberikan pedoman bagi pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo untuk melakukan perencanaan yang integratif terhadap kawasan perdesaan yang mendukung pengembangan kelembagaan BUM Desa.
2. Mengidentifikasi faktor substantif yang mempengaruhi perkembangan dan keberlanjutan terhadap kelembagaan BUM Desa sebagai instrumen strategis mewujudkan kemandirian ekonomi desa.
3. Memformulasikan sintesa kebijakan publik yang dapat mendukung terhadap perkembangan dan keberlanjutan terhadap kelembagaan BUM Desa sebagai instrumen strategis mewujudkan kemandirian ekonomi desa.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat keilmuan :
Hasil kajian ini akan memberikan kontribusi terhadap perencanaan wilayah khususnya wilayah perdesaan dengan instrumen kelembagaan BUM Desa. Perencanaan pembangunan wilayah perdesaan merupakan *basic concept* terhadap pengelolaan sumberdaya di desa.
2. Manfaat kebijakan :
Secara jangka panjang, dapat mengotimalkan strategi pengembangan ekonomi perdesaan dengan cara memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat di perdesaan agar terlibat secara aktif dalam proses pembangunan perdesaan.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Mewirausahakan Pemerintah

Istilah *reinventing government* (mewirausahakan pemerintah) muncul dari gagasan yang dikemukakan Osborne dan Gaebler (1996) sebagai salah satu perspektif teori yang berkembang, dan upaya untuk perbaikan dan penyempurnaan manajemen publik termasuk pemerintahan atau birokrasi. *Reinventing government* pada intinya menuntut adanya desentralisasi kekuasaan kepada struktur terbawah, standar prosedur operasi yang elastis, kreativitas dan inovasi, jenjang kekuasaan yang *flat*, serta sistem kepegawaian yang lebih kompetitif dan terbuka. Pandangan Osborne dan Gaebler (1996) yang “negatif” atas keberadaan peraturan dimaksud, dilatarbelakangi oleh kritik terhadap kebijakan masa pemerintahan Reagan yang lebih berusaha mengontrol para birokrat dari pada melakukan deregulasi sektor publik seperti halnya deregulasi sektor privat atau swasta. Jika misi organisasi publik yang dikehendaki Osborne dan Gaebler adalah misi untuk menuju kompetisi dan mekanisme pasar, maka organisasi publik itu konsekuensinya harus mengubah menjadi organisasi privat (Deliarnov, 2006)

2.1.1 Kelembagaan BUMDes Pada Perspektif Ilmu Ekonomi

Pada suatu perekonomian yang rumit dan luas, banyak aktor baik individu (secara perorangan) maupun kelompok (secara organisasi) terlibat dalam aktivitas ekonomi dan politik dengan motivasi yang beraneka ragam. Namun dalam perkembangannya (dengan memperhatikan aspek teoritis, yuridis, dan praktis), ternyata aktivitas-aktivitas tersebut sulit untuk diidentifikasi dan dipisahkan secara tegas dan jelas atas ranah dari ketiga sektor dimaksud (publik, privat, dan komunitas). interseksi antara sektor publik dengan sektor privat memunculkan institusi Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) yang seluruh atau sebagian

besar modalnya berasal dari kekayaan negara/daerah yang dipisahkan, dan merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional melalui penyediaan barang-jasa guna mengejar keuntungan untuk meningkatkan nilai perusahaan (milik negara atau daerah) [menurut UU 5/1962 dan UU 19/2003]. Sedangkan di lingkup desa menurut PP 72/2005, BUMDes nampaknya diarahkan dan dimantapkan sebagai salah satu unit pelayanan usaha mikro atau kecil, karena modal usaha untuk mengembangkan usaha masyarakat desa yang dimiliki dan dikelola oleh masyarakat dengan pemerintah desa setempat.

2.2 Dinamika Kemandirian Ekonomi Desa

Desa merupakan sub-sistem penyelenggaraan pemerintahan di daerah, sehingga pemerintahan desa adalah unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat, dan menjadi titik yang strategis. Kemandirian desa itu dipengaruhi beberapa faktor, seperti; desentralisasi kewenangan, kapasitas perangkat (SDM), penguatan keuangan, perubahan kelembagaan pemerintahan desa dan kelembagaan masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat desa itu sendiri, yang dapat dilihat dari berbagai perspektif (Manig, 1992).

2.3 Pembangunan Desa Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang berkelanjutan dapat diartikan secara luas sebagai kegiatan-kegiatan di suatu wilayah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di masa sekarang tanpa membahayakan daya dukung sumberdaya bagi generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Ada empat aspek umum ciri-ciri spesifik terpenting mengenai konsep agroekosistem. Empat aspek umum tersebut adalah :

- (1). Kemerataan (*equitability*),

- (2). Keberlanjutan (*sustainability*),
- (3). Kestabilan (*stability*) dan
- (4). Produktivitas (*productivity*).

Secara sederhana, *equitability* merupakan penilaian tentang sejauh mana hasil suatu lingkungan sumberdaya di distribusikan diantara masyarakatnya. *Sustainability* dapat diberi pengertian sebagai kemampuan sistem sumberdaya mempertahankan produktivitasnya. *Stability* merupakan ukuran tentang sejauh mana produktivitas sumberdaya bebas dari keragaman yang disebabkan oleh fluktuasi faktor lingkungan. *Productivity* adalah ukuran sumberdaya terhadap hasil fisik atau ekonominya.

2.3.1 Pemberdayaan Ekonomi Perdesaan

Menurut Prijono dan Pranarka (1996), pemberdayaan mengandung dua kecenderungan: pertama, kecenderungan primer yang menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat. Kedua, kecenderungan sekunder yang menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Menurut Sumodiningrat (1996), pembangunan yang berorientasi pada masyarakat memberikan kesempatan kepada setiap anggota masyarakat untuk dapat ikut serta dalam proses pembangunan dengan mendapatkan kesempatan yang sama dan menikmati hasil pembangunan tersebut sesuai kemampuannya. Pemberdayaan masyarakat perdesaan merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat melalui perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Dalam setiap upaya pemberdayaan baik yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha maupun pihak-pihak lainnya, upaya itu harus dipandang sebagai sebuah pemacu untuk menggerakkan kegiatan ekonomi rakyat.

BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Kegiatan

Kegiatan penelitian ini melingkupi dua hal yaitu ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi. Ruang lingkup wilayah adalah pemerintah desa yang berada di wilayah Kabupaten Situbondo. Sedangkan ruang lingkup kajian materi meliputi : analisis dan pemetaan keragaan relatif tingkat perkembangan desa sebagai lembaga pemerintahan otonom. Selain itu juga, kegiatan ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan dan keberlanjutan terhadap kelembagaan BUM Desa serta strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengembangan potensi ekonomi bagi wilayah perdesaan di Kabupaten Situbondo dengan berbasis pada kelembagaan BUM Desa.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam kajian ini berupa data primer yang diperoleh dari hasil wawancara, serta data sekunder dari instansi terkait dan data Potensi Desa tahun 2015. Responden dalam pengambilan data primer, dipilih secara “*purposive sampling*” berdasarkan komoditas yang menjadi unggulan di masing-masing kawasan perdesaan. Pelaksanaan penelitian terdiri atas: (1) perumusan kerangka pendekatan dan identifikasi indikator-indikator utama sebagai penciri utama karakteristik kawasan perdesaan; (2) penentuan wilayah studi berdasarkan kondisi eksisting dari karakteristik wilayah perdesaan; (3) penetapan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan keberlanjutan terhadap kelembagaan BUM Desa; (4) penyusunan/perancangan kuesioner untuk pengumpulan data primer untuk masing-masing kawasan, yang meliputi kuesioner gambaran umum kawasan, kuesioner usaha dari BUM Desa, dan kuesioner kelembagaan;

(5) pelaksanaan survei lapangan dan pengumpulan data sekunder untuk setiap kawasan yang telah ditetapkan; (6) tabulasi data dan analisis data/informasi; (7) penyusunan tabel indikator-indikator yang mempengaruhi keberlanjutan perkembangan BUM Desa di Kabupaten Situbondo.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data–data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini diantaranya adalah :

1. Data potensi ekonomi desa
2. Data karakteristik produksi pertanian, perikanan dan peternakan
3. Karakteristik infrastruktur/fasilitas
4. Karakteristik sumber daya sosial dan kelembagaan ekonomi
5. Struktur penguasaan sumber daya
6. Perkembangan wilayah perdesaan
7. Faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kelembagaan BUM Desa
8. Data yang terkait dengan regulasi perdesaan dan BUM Desa

Sedangkan data primer diperoleh langsung melalui *depth interview* atau wawancara secara mendalam oleh peneliti.

3.4 Penentuan Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di 17 kecamatan dan instansi-instansi pemerintahan yang terkait dengan perkembangan berkelanjutan BUM Desa yang ada di wilayah Kabupaten Situbondo. Waktu penelitian dilaksanakan selama tiga bulan yang diawali pada 01 Agustus 2017 sampai dengan 27 Oktober 2017.

3.5 Metode Analisis

3.5.1 Analisis Structural Equation Modeling (SEM)

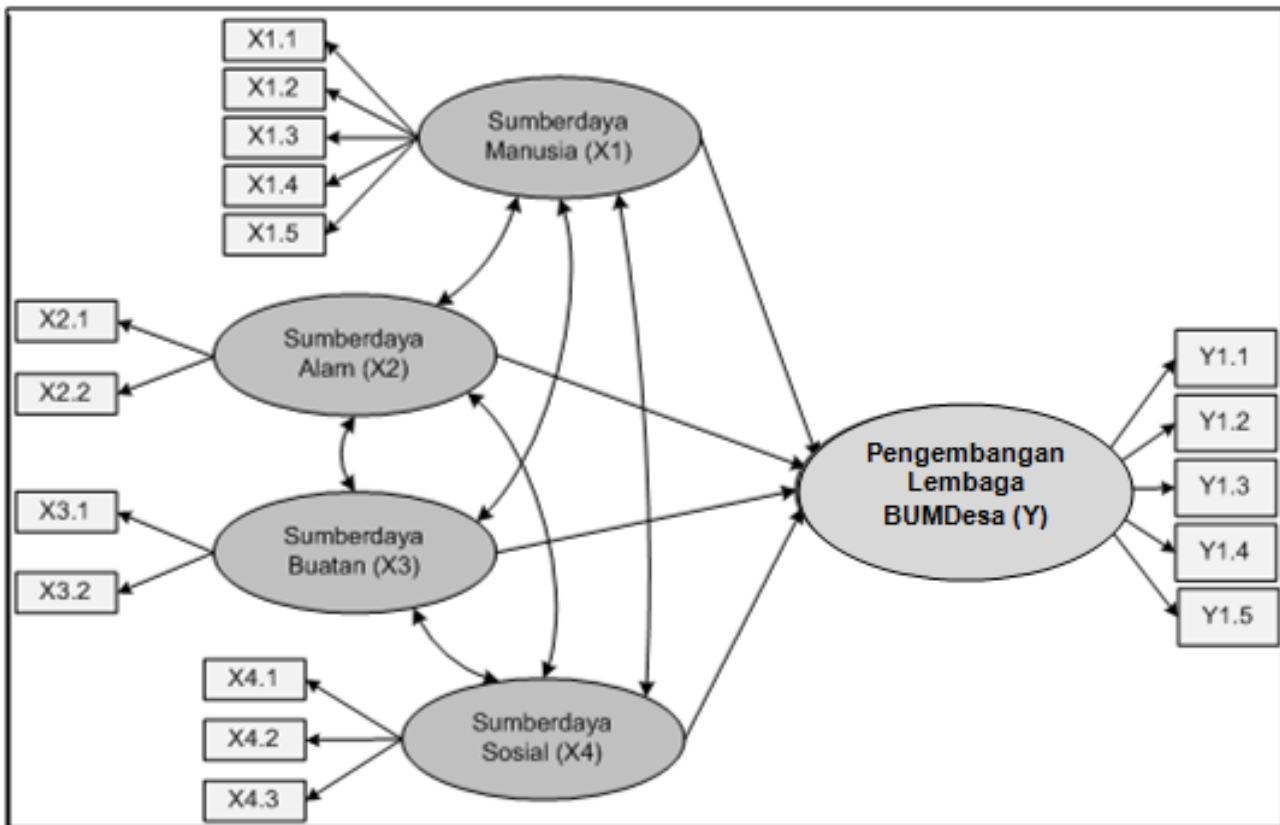
Analisis ini digunakan untuk menguji hipotesis penelitian yang telah ditetapkan dengan menggunakan data sampel yang diperoleh. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Structural Equation Modeling* (SEM). Langkah-langkah pembentukan model persamaan struktural (Hair, 2006) adalah sebagai berikut:

A. Pengembangan Model Teoretis

Teknik ini merupakan teknik menguji teori baru atau teori yang sudah dikembangkan dan yang akan diuji lagi secara empiris.

B. Pengembangan Diagram Jalur (*Path Diagram*)

Model teoretis yang telah dibangun pada tahap pertama akan digambarkan dalam sebuah diagram jalur, yang akan mempermudah untuk melihat hubungan-hubungan kausalitas yang ingin diuji.



Gambar 3.1. Struktural Model (Diagram Jalur) untuk SEM

Keterangan:

(Y) PBUMDes (Pengembangan Lembaga BUMDesa)

- Y1.1. Potensi/kapasitas sumberdaya alam dan lingkungan di wilayah perdesaan.
- Y1.2. Jumlah dan ragam prasarana dan sarana wilayah perdesaan untuk mendukung pengembangan BUMDesa
- Y1.3. Jumlah dan ragam prasarana fisik yang mendukung pengembangan kelembagaan BUM Desa
- Y1.4. Jumlah dan ragam prasarana non fisik yang mendukung pengembangan kelembagaan BUM Desa
- Y1.5. Kelestarian lingkungan hidup (sumber daya alam, sosial budaya)

(X1) Sumberdaya Manusia

- X1.1. Penguasaan pengetahuan tentang Bum Desa
- X1.2. Ketrampilan pengelolaan BUM Desa
- X1.3. Kompetensi operasional pengelolaan BUM Desa
- X1.4. Etos kerja/Sosial terhadap pengelolaan BUM Desa

X1.5. Motivasi pengelolaan BUM Desa

X1.6. Sikap terhadap pengelolaan BUM Desa

(X2) Sumberdaya Alam

- X2.1. Ketersediaan SDA dan potensi wilayah
- X2.2. Hak kepemilikan dari SDA dan potensi wilayah.

(X3) Sumberdaya Buatan/Sarana dan Prasarana

- X3.1. Aksesibilitas terhadap fasilitas bantuan pemerintah dan swasta
- X3.2. Ketersediaan sarana pendukung

(X4) Sumberdaya Sosial

- X4.1. Rasa percaya
- X4.2. Organisasi Sosial (Network)
- X4.3. Regulasi/Aturan-aturan Adat/Budaya (Norm)

C. Evaluasi kriteria Goodness of Fit

Pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap kesesuaian model melalui telaah terhadap berbagai kriteria *goodness of fit*. indeks-indeks yang digunakan untuk menguji kelayakan sebuah model adalah seperti dalam tabel berikut:

Goodness of fit index	Cut-of value
Significaned Probability	≥ 0.05
RMSEA	≤ 0.08
GFI	≥ 0.90
AGFI	≥ 0.90
CMIN/DF	≤ 2.00
TLI	≥ 0.95
CFI	≥ 0.95

Sumber : Ferdinand (2002:61)

D. Pengujian Asumsi Model SEM

Prinsip uji hipotesis asumsi model adalah sebagai berikut.

1. Asumsi linieritas yaitu asumsi yang menghendaki semua hubungan berbentuk linier
2. Asumsi tidak adanya *outlier* (pencilan).
3. Asumsi normalitas sebaran, yaitu data yang akan dianalisis (*variabel latent*) dengan menyebar normal (normal ganda).

E. Pengujian Model Struktural: Uji Hipotesis Penelitian

Setelah model tersebut memenuhi syarat, maka yang perlu dilakukan selanjutnya adalah uji *regression weight/loading faktor*.

- H1. Sumberdaya manusia berpengaruh terhadap pengembangan BUM Desa sebagai instrumen strategis untuk mewujudkan kemandirian ekonomi perdesaan di Kabupaten Situbondo
Hipotesis statistika sebagai berikut:
 $H_0 : \gamma_1 = 0$
 $H_1 : \gamma_1 \neq 0$
- H2. Sumberdaya alam berpengaruh terhadap pengembangan BUM Desa sebagai instrumen strategis untuk mewujudkan kemandirian ekonomi perdesaan di Kabupaten Situbondo
Hipotesis statistika sebagai berikut:
 $H_0 : \gamma_2 = 0$
 $H_1 : \gamma_2 \neq 0$
- H3. Sumberdaya buatan berpengaruh terhadap pengembangan BUM Desa sebagai instrumen strategis untuk

mewujudkan kemandirian ekonomi perdesaan di Kabupaten Situbondo

Hipotesis statistika sebagai berikut:

$$H_0 : \gamma_3 = 0$$

$$H_1 : \gamma_3 \neq 0$$

- H4. Sumberdaya sosial berpengaruh terhadap pengembangan BUM Desa sebagai instrumen strategis untuk mewujudkan kemandirian ekonomi perdesaan di Kabupaten Situbondo
Hipotesis statistika sebagai berikut:

$$H_0 : \gamma_4 = 0$$

$$H_1 : \gamma_4 \neq 0$$

- H5. Sumberdaya manusia berkaitan dengan sumberdaya alam
Hipotesis statistika sebagai berikut:

$$H_0 : \rho_1 = 0$$

$$H_1 : \rho_1 \neq 0$$

- H6. Sumberdaya manusia berkaitan dengan sumberdaya buatan
Hipotesis statistika sebagai berikut:

$$H_0 : \rho_2 = 0$$

$$H_1 : \rho_2 \neq 0$$

- H7. Sumberdaya manusia berkaitan dengan sumberdaya sosial
Hipotesis statistika sebagai berikut:

$$H_0 : \rho_3 = 0$$

$$H_1 : \rho_3 \neq 0$$

- H8. Sumberdaya alam berkaitan dengan sumberdaya buatan
Hipotesis statistika sebagai berikut:

$$H_0 : \rho_4 = 0$$

$$H_1 : \rho_4 \neq 0$$

- H9. Sumberdaya alam berkaitan dengan sumberdaya sosial
Hipotesis statistika sebagai berikut:

$$H_0 : \rho_5 = 0$$

$$H_1 : \rho_5 \neq 0$$

- H10. Sumberdaya buatan berkaitan dengan sumberdaya sosial
Hipotesis statistika sebagai berikut:

$$H_0 : \rho_6 = 0$$

$$H_1 : \rho_6 \neq 0$$

Hipotesis penelitian diterima (H_1 diterima) jika nilai *Critical Ratio* (CR) > 1.96 atau nilai P-value < 0.05 (tingkat kesalahan 5%). Sebaliknya hipotesis penelitian ditolak (H_0 diterima) jika nilai CR < 1.96 atau nilai P-value > 0.05 .

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

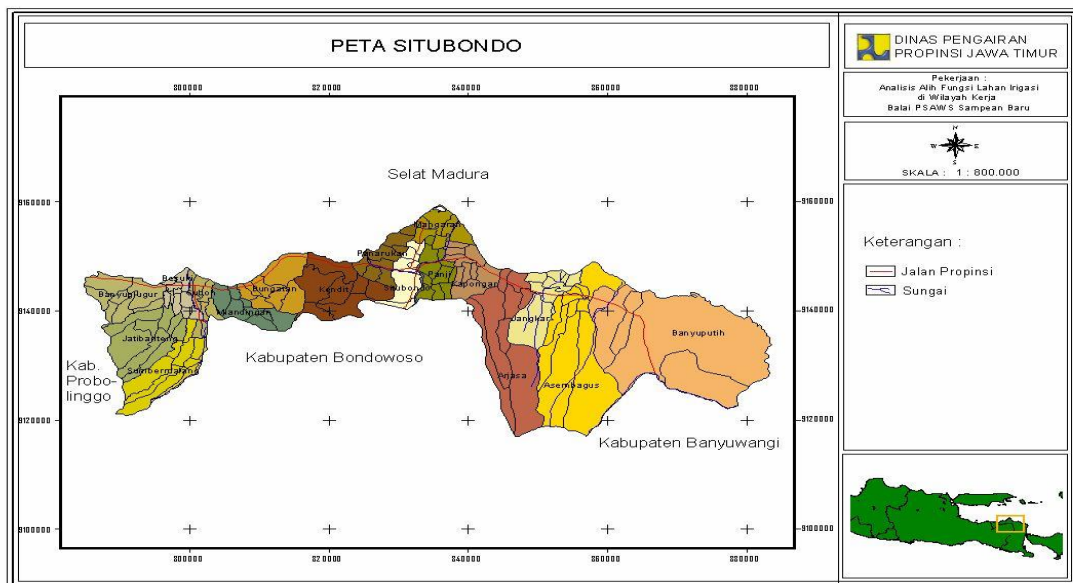
4.1 Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Situbondo

Kabupaten Situbondo merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang cukup dikenal dengan sebutan “Daerah Wisata Pantai Pasir Putih“ yang letaknya diujung timur Pulau Jawa, bagian Utara dengan posisi di antara $7^{\circ}35' - 7^{\circ}44'$ Lintang Selatan dan $113^{\circ}30' - 114^{\circ}42'$ Bujur Timur. Luas wilayah

menurut kecamatan terluas adalah Kecamatan Banyuputih $48,167 \text{ km}^2$ disebabkan oleh karena luasnya hutan jati di perbatasan antara Kecamatan Banyuputih dan Wilayah Banyuwangi Utara. Sedangkan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Besuki yaitu 2.641 km^2 .

Kabupaten Situbondo mempunyai batas-batas wilayah dengan kabupaten sekitarnya sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Selat Madura
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Banyuwangi
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo
- Sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali.



Gambar 4.1: Peta Wilayah Kabupaten Situbondo

4.2 Hasil Analisis Data Keragaan Perkembangan Desa

Hasil analisis terhadap variabel keragaan perkembangan perdesaan salah satunya menghasilkan skor setiap desa. Tujuan dari analisis kelompok ini adalah untuk membuat pengelompokan (*clustering*) perkembangan desa di Kabupaten Situbondo serta mempelajari karakteristik masing-masing kelompok perdesaan terhadap

kelembagaan BUM Desa. Kluster wilayah terhadap pembangunan kawasan perdesaan berbasis kelembagaan BUM Desa wilayah sebagai berikut : (1). BUM Desa kawasan perdesaan (2). BUM Desa kawasan hutan, (3). BUM Desa kawasan perkotaan dan (4). BUM Desa kawasan pesisir.

4.2.1 BUM Desa yang berada di Kawasan Perdesaan

Lembaga BUM Desa di kawasan perdesaan yang diteliti adalah daerah Desa Curah Cottok Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo dengan nama BUM Desa “Dharma Pitaloka”. Pengelolaan BUM Desa “Dharma Pitaloka” menjalankan usaha rental mobil yang mana dikelola oleh segenap anggota dan masyarakat Desa Curah Cottok. Hasil analisis skalogram diketahui bahwa nilai rata-ran Indeks Perkembangan Desa (IPD) Curah cottok adalah sebesar 42,34 dengan standar deviasi (Stdev) sebesar 11,76 dan, sehingga desa tersebut tergolong dalam hierarki II mempunyai IPD antara 40,02 hingga 60,93.

4.2.2 BUMDesa yang berada di Kawasan Hutan

Pada kawasan hutan diteliti yaitu Desa Trebungan, Kecamatan Mlandingan terdapat BUMDes dengan nama “Nyior Poan”. Usaha yang menjadi andalan BUMDes “Nyior Poan” adalah kelapa kopyor. Usaha ini dilakukan oleh BUMDes “Nyior Poan” karena keberadaan kelapa kopyor sangat melimpah di Desa Trebungan. Tetapi dalam pengelolaan sumber daya alam lainnya masih kurang, karena sempat terjadi kekeringan yang dikarenakan rusaknya bendungan pada awal tahun 2014. Hasil analisis skalogram diketahui bahwa nilai rata-ran Indeks Perkembangan Desa (IPD) Trebungan adalah sebesar 41,80 dengan standar deviasi (Stdev) sebesar 11,76 dan, sehingga desa tersebut yang tergolong dalam hierarki II mempunyai IPD antara 40,02 hingga 60,93.

4.2.3 BUM Desa yang berada di Kawasan Perkotaan

Adapun BUMDes di wilayah perkotaan yaitu daerah *second city* Situbondo yaitu di daerah Asembagus. BUMDes yang diteliti yaitu di Desa Bantal Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo dengan nama BUMDes “Bantal Mandiri” dengan jenis usaha yang dijalankan konveksi dan batako yang mana langsung dikelola oleh karang taruna “Bina Remaja” yang dinaungi langsung oleh

BUMDes “Bantal Mandiri”, selain itu Pemerintah Desa Bantal melalui BUMDes “Bantal Mandiri” membina pengusaha kacang oven. Hasil analisis skalogram diketahui bahwa nilai rata-ran Indeks Perkembangan Desa (IPD) Bantal adalah sebesar 38,80 dengan standar deviasi (Stdev) sebesar 11,76 dan, sehingga desa tersebut yang tergolong dalam hierarki II mempunyai IPD antara 40,02 hingga 60,93.

4.2.4 BUM Desa yang berada di Kawasan Pesisir

Dalam penelitian BUMDes di wilayah pesisir yaitu di daerah Desa Ketah, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo. Usaha yang dilaksanakan oleh BUMDes di Desa Ketah adalah Bengkel, Cuci Mobil, dan Simpan Pinjam. Dalam pelaksanaan kegiatan BUMDes, pengelola BUMDes merekrut orang lokal di Desa Ketah agar pengangguran berkurang dan menyokong perekonomian di Desa Ketah. Tetapi dalam penerapannya masih belum berbasiskan SDA (Sumber Daya Alam) yang ada yaitu masih belum memanfaatkan wilayah pesisir dan rencana ke depannya akan memanfaatkan potensi pesisir yang ada di Desa Ketah. Hasil analisis skalogram diketahui bahwa bahwa nilai rata-ran Indeks Perkembangan Desa (IPD) Ketah adalah sebesar 43,05 dengan standar deviasi (Stdev) sebesar 11,76 dan, sehingga desa tersebut yang tergolong dalam hierarki II mempunyai IPD antara 40,02 hingga 60,93.

4.3 Hasil Analisis Data

4.3.1 Uji Normalitas

Hasil perhitungan menunjukkan nilai CR *multivariate* sebesar 16.354. Nilai CR ini ternyata > 1.96 maka asumsi normalitas *multivariate* tidak terpenuhi, maka data penelitian ini dipandang sudah memenuhi dalil limit pusat, sehingga asumsi normalitas data tidak bersifat kritis dan dapat tidak digunakan.

4.3.2 Uji Outlier

Dari Tabel Mahalanobis *distance* dapat dilihat bahwa titik observasi yang paling jauh adalah titik ke 57 dengan nilai $Md = 46.525$. Jika dibandingkan dengan nilai $\chi^2 = 112.3169$ maka nilai Md titik ke-57 < 112.3169, maka disimpulkan bahwa seluruh data bukan merupakan *outlier*, sehingga asumsi tidak terjadinya *outlier* pada data dapat dipenuhi.

4.3.3 Goodness of Fit SEM

Model dikatakan fit. Hasil pengujian *goodness of fit overall model* pada penelitian analisis terhadap pengembangan dan keberlanjutan kelembagaan BUM Desa di Kabupaten Situbondo seperti pada tabel berikut

Hasil pengujian *Goodness of Fit Overall* berdasarkan tabel, dapat diketahui

KRITERIA	CUT-OF VALUE	HASIL PENGUJIAN	KETERANGAN
Sig Prob	≥ 0.05	0.000	Model Kurang Baik
Chi Square/db	Diharapkan kecil	1.888	Model Baik
RMSEA	≤ 0.08	0.067	Model Baik
GFI	≥ 0.90	0.752	Model Kurang Baik
AGFI	≥ 0.90	0.661	Model Kurang Baik
TLI	≥ 0.95	0.721	Model Kurang Baik
CFI	≥ 0.95	0.183	Model Kurang Baik

bahwa hampir semua kriteria menunjukkan model kurang baik. Akan tetapi, nilai *The Root Mean Square Error of Approximation* (RMSEA) dan *CMIN/DF* sebesar 0.067 dan 1.888 telah memenuhi *cut off value* yaitu lebih kecil dari 0.08 kurang dari 2.

4.3.4 Model Pengukuran (Measurement Model)

Model pengukuran diukur dari nilai *loading factor* pada setiap indikator ke variabel laten.

4.4 Variabel Pengembangan Lembaga BUM Desa

Hasil analisis SEM measurement model terhadap indikator-indikator dari variabel pengembangan lembaga BUM Desa dapat dilihat pada tabel berikut.

INDIKATOR	KOEFISIEN STANDARDIZE	P-VALUE
Potensi/kapasitas sumberdaya alam dan lingkungan di wilayah perdesaan (Y1.1)	0.538	<0.001
Jumlah dan ragam sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung pengembangan BUM Desa (Y1.2)	0.578	<0.001
Jumlah dan ragam prasarana fisik yang mendukung pengembangan kelembagaan BUM Desa (Y1.3)	0.572	FIX
Jumlah dan ragam prasarana non fisik yang mendukung pengembangan kelembagaan BUM Desa (Y1.4)	0.768	<0.001
Kelestarian lingkungan hidup (sumber daya alam, sosial budaya) (Y1.5)	0.758	0.004

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa kelima indikator tersebut signifikan membentuk variabel pengembangan kelembagaan BUM Desa pada wilayah perdesaan di Kabupaten Situbondo.

4.4.1 Variabel Sumberdaya Manusia

Hasil analisis SEM measurement model terhadap indikator-indikator dari variabel sumberdaya manusia dapat dilihat pada tabel berikut

INDIKATOR	KOEFISIEN STANDARDIZE	P-VALUE
Ketersediaan SDA dan potensi wilayah (X2.1)	0.841	FIX
Kepadatan dari kawasan permukiman dengan penduduk (X2.2)	0.670	<0.001

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa kedua indikator tersebut signifikan membentuk variabel sumberdaya alam, karena nilai p-value seluruh indikator lebih kecil dari 5 % (0.05) indikator dinyatakan fix

4.4.2 Variabel Sumberdaya Buatan

Hasil analisis SEM measurement model terhadap indikator-indikator dari variabel sumberdaya buatan dapat dilihat pada tabel berikut

INDIKATOR	KOEFISIEN STANDARDIZE	P-VALUE
Aksesibilitas terhadap fasilitas bantuan pemerintah dan swasta (X3.1)	0.746	FIX
Ketersediaan sarana pendukung (X3.2)	0.826	<0.001

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa kedua indikator tersebut signifikan membentuk variabel sumberdaya buatan. Hal ini dikarenakan nilai p-value seluruh indikator lebih kecil dari 5 % (0.05) maupun dinyatakan fix (ditetapkan).

4.4.3 Variabel Sumberdaya Sosial

Hasil analisis SEM measurement model terhadap indikator-indikator dari variabel sumberdaya sosial dapat dilihat pada tabel berikut

INDIKATOR	KOEFISIEN STANDARDIZE	P-VALUE
Rasa percaya (X4.1)	0.650	FIX
Organisasi Sosial/Network (X4.2)	0.897	<0.001
Regulasi/Aturan-aturan Adat/Budaya (Norma) (X4.3)	0.634	<0.001

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa kedua indikator tersebut signifikan membentuk variabel sumberdaya sosial. Hal ini dikarenakan p-value seluruh indikator lebih kecil dari 5 %.

4.5 Model Struktural (*Structural Model*)

Pada model struktural hakekatnya adalah pengujian hipotesis pada penelitian ini. Pengujian hipotesis pengaruh langsung dilakukan dengan uji-t pada masing-masing jalur pengaruh secara parsial. Hasil analisis secara lengkap, terdapat dalam hasil analisis SEM. Tabel berikut menyajikan hasil pengujian hipotesis pengaruh.

Variabel Bebas	Koefisien SEM	P-value	Keterangan
Sumberdaya Manusia → pengembangan BUM Desa di Kabupaten Situbondo	0.347	0.002	Signifikan
Sumberdaya Alam → pengembangan BUM Desa di Kabupaten Situbondo	0.356	0.002	Signifikan
Sumberdaya Buatan → pengembangan BUM Desa di Kabupaten Situbondo	0.344	0.002	Signifikan
Sumberdaya Sosial → pengembangan BUM Desa di Kabupaten Situbondo	0.329	0.002	Signifikan

Pemodelan model terhadap pengembangan BUM Desa di Kabupaten Situbondo melibatkan kelima variabel bebas yaitu sumberdaya manusia, sumberdaya alam, sumberdaya buatan, sumberdaya sosial, dan pengembangan BUM Desa.

Pengujian pengaruh sumberdaya manusia terhadap pengembangan BUM Desa diperoleh koefisien SEM model struktural sebesar 0.347 dengan nilai P-value sebesar 0.002. Karena nilai P-value < 0.05 maka hipotesis yang menyatakan “terdapat pengaruh sumberdaya manusia terhadap pengembangan BUM Desa” dapat diterima.

Pengujian pengaruh sumberdaya alam terhadap pengembangan BUM Desa di Kabupaten Situbondo, diperoleh koefisien SEM model struktural sebesar 0.356 dengan nilai P-value sebesar 0.002. Karena nilai P-value < 0.05 maka hipotesis yang menyatakan

“terdapat pengaruh sumberdaya alam terhadap pengembangan BUM Desa” dapat diterima.

Pengujian pengaruh sumberdaya buatan terhadap pengembangan BUM Desa di Kabupaten Situbondo, diperoleh koefisien SEM model struktural sebesar 0.344 dengan $p=0.002$. Nilai p hasil perhitungan ternyata < 0.05, sehingga hipotesis yang menyatakan “terdapat pengaruh sumberdaya buatan terhadap pengembangan BUM Desa” dapat diterima.

Pengujian pengaruh sumberdaya sosial terhadap pengembangan BUM Desa di Kabupaten Situbondo diperoleh koefisien SEM model struktural sebesar 0.329 dengan nilai P-value sebesar 0.002. Karena nilai P-value < 0.05 maka hipotesis yang menyatakan “terdapat pengaruh sumberdaya sosial terhadap pengembangan BUM Desa” dapat diterima.

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dalam kajian ini dapat disimpulkan diantaranya, yaitu :

1. Keragaan kawasan perdesaan di wilayah Kabupaten Situbondo mempunyai beberapa klasifikasi perkembangan desa yang terkait dengan pengembangan kelembagaan BUM Desa.
2. Perbedaan antara desa yang mempunyai BUM Desa dengan yang tidak mempunyai BUM Desa terjadi perbedaan yang signifikan
3. Hasil analisis SEM menunjukkan tingginya nilai koefisien yang menggambarkan kekuatan kontribusi indikator terhadap pengembangan BUM Desa di Kabupaten Situbondo
4. Terdapat 3 design kebijakan yang diformulasikan untuk mendukung pengembangan BUM Desa di Kabupaten Situbondo. Dari hasil bobot skor

rangking I (pertama) adalah Kebijakan level pertama skor paling besar 0,044; rangking II (kedua) adalah kebijakan yang operasional pengelolaan BUM Desa dengan skor 0,014; dan rangking III (ketiga) adalah Kebijakan level ketiga adalah pemberdayaan masyarakat dengan skor yaitu 0,008.

5.2 Saran-Saran

Hasil kajian ini memberikan rekomendasi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo terhadap pengembangan kelembagaan BUM Desa sebagai instrumen untuk mewujudkan kemandirian ekonomi perdesaan, diantaranya sebagai berikut :

1. Mendorong terwujudnya *political will* yang kongkret, yaitu dengan mengatur kebijakan tentang kelembagaan BUMDesa di kawasan perdesaan, kota, hutan dan pesisir berdasarkan potensi setiap wilayah karena memang masing-masing desa tentu memerlukan penanganan yang berbeda.
2. Meningkatkan berbagai program pelatihan dan pendampingan terhadap kelembagaan BUM Desa berdasarkan komoditas/produk unggulan untuk mengembangkan kemandirian ekonomi perdesaan. Selain itu juga mendorong terwujudnya perintisan - perintisan pembangunan ekonomi lokal yang dilakukan oleh masyarakat perdesaan.
3. Merealisasikan instrumen yang dapat membangun keterkaitan antar komunitas masyarakat perdesaan, institusi dan partisipasi aktif semua *stakeholder* dalam mendorong perkembangan potensi setiap desa.
4. Mendorong terwujudnya daya dukung dan partisipasi aktif dari para pihak yang terkait dengan perkembangan kawasan perdesaan di Kabupaten Situbondo.

Melakukan kemitraan dengan berbagai pihak untuk memetakan, mengelola dan

mengembangkan terhadap potensi komoditas unggulan, produk unggulan dan potensi sumberdaya alam yang ada di kawasan perdesaan di Kabupaten Situbondo.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2014. *Best Practices in Rural & Small Town Economic Development*. Rick Hundey Management and Planning Services. Canada
- Anonim. 2012. *Rural Economic Development Initiative (REDI)*. Division of Community Development Florida Department of Economic Opportunity. Florida.
- Allen, John C, Rebecca Filkins and Sam Cordes. 2000. *Alternative Development Strategies for Rural Communities: Views from the Great Plains*. Department of Agricultural Economics, University of Nebraska-Lincoln. Washington DC.
- Anwar, A. 2005. *Ketimpangan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan (Tinjauan Kritis)*. P4WPress. Bogor
- Rifai, S. A. 1989. *Akuakultur dan Lingkungan*. Makalah disajikan dalam seminar Industri dan Lingkungan Hidup. Palembang 20-21 Juni 1989.
- Royce, W. F. 2007.
- Bourgeois, R dan F. Jesus. 2004. *Participatory Prospective Analisis. Exploring and Anticipating Challenges with Stakeholders*. UNESCAP-CAPSA. Bogor.
- Budiman, A. 1995. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Bungin, H.M.B. 2008. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Kencana (Prenada Media Group). Jakarta.
- Chambers, Robert. 1994. *The Origins and Practice of Participatory Rural Appraisal*. World Development Institute of Development Studies, Brighton.
- Coen, R., H. Bertus dan W.B. Ann. 1992. *Pertanian Masa Depan Pengantar untuk*

- Pertanian Berkelanjutan dengan Input Luar Rendah. Penerbit Kanisius. Jakarta.
- Cohen, M., John. Uphoff, T., Norman. 1977. *Rural Development Participation: Concepts and Measures for Project Design, Implementation and Evaluation*. Ithaka. Cornell University
- Collier, W.L., Santoso, K. 1996. *A New Approach to Rural Development in Java: Twenty Five Years of Village Studies. Sajogyo (penerjemah). Pendekatan Baru Dalam Pembangunan Pedesaan di Jawa: Kajian Pedesaan Selama Dua Puluh Lima Tahun, Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.*
- Connell, D.J., Wall, E. 2004. *New Rural Economy: Economic Capacity Profile. Journal of Extension. Volume : 42, Number : 4, <http://www.joe.org/joe/2004august/a2.php>. Agust 2011.*
- Creswell, J.W. 2010. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Achmad Fawaid (penerjemah). Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed, Pustaka Pelajar. Yogyakarta.*
- Caporaso, J.A., Levine, D.P. 2008. *Theories of Political Economy. Suraji (penerjemah). Teori-Teori Ekonomi Politik, Pustaka Pelajar. Yogyakarta.*
- Carroll, M.C., Stanfield, J.R. 2003. *Social Capital, Karl Polanyi, and American Social and Institutional Economics. Journal of Economic Issues. Vol. XXXVII, No. 2 June: 397-404.*
- Coleman, J.S. 2010. *Foundations of Social Theory. Imam Muttaqien dkk. (penerjemah). Dasar-Dasar Teori Sosial, Nusa Media. Bandung.*
- Collier, P. 2010. *The Political Economy of Natural Resources. Social Research. Vol. 77, No. 4 Winter: 1105-1132.*
- Deliarnov. 2005. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi, RajaGrafindo Persada. Jakarta.*
- _____. 2006. *Ekonomi Politik, Erlangga. Jakarta.*
- Dharmawan, A.H. 2006. *Pendekatan-Pendekatan Pembangunan Pedesaan dan Pertanian: Klasik dan Kontemporer, makalah seminar "Apresiasi Perencanaan Pembangunan Pertanian Daerah bagi Tenaga Pemandu Teknologi Mendukung Prima Tani". Cisarua Bogor. 19-25 November.*
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. 2011. *Spirit Konstitusi, Hegemoni Modal, dan Kedaulatan Ekonomi, Refleksi Akademik 50 Tahun Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. 8 Oktober.*
- Field, J. 2005. *Social Capital (Modal Sosial), Bina Media Perintis. Medan.*
- Franke, S. 2005. *Measurement of Social Capital: Reference Document for Public Policy Research, Development, and Evaluation, Report to the Policy Research Initiative (PRI), September, Ottawa, Canada.*